

PENEMPATAN PLAN CHINA DI NAVAL SUPPORT BASE DJIBOUTI 2017-2020 SEBAGAI STRATEGI KEAMANAN

Kevin Hakim Pramudya¹, Tendy²✉

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: tendy@fisip.unmul.ac.id

Article history

Received 2024-03-11 | Accepted 2024-03-16 | Published 2024-05-25

Abstrak

Djibouti, dengan lokasi geografis strategis, menjadi tuan rumah bagi berbagai instalasi militer asing, termasuk Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Italia, dan China. China menjadi negara kelima yang memiliki instalasi militer di Djibouti, dengan penempatan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLAN) di pangkalan dukungan angkatan laut pada 2017. Penempatan ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika keamanan regional dan global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data primer dan sekunder, serta konsep "kepentingan nasional" dari Donald E. Neuchterlein untuk memahami faktor-faktor yang mendorong penyebaran PLAN di Djibouti dan dampaknya terhadap kepentingan nasional China, serta aktor regional dan internasional terkait. Studi ini mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti modernisasi PLA, strategi maritim China, kondisi keamanan di Afrika, kepentingan ekonomi, dan ambisi untuk menyeimbangkan hegemoni AS menjadi pendorong utama. Penempatan PLAN di Djibouti bertujuan meningkatkan kehadiran militer China di wilayah strategis dan melindungi rute perdagangan maritim. Hal ini juga memunculkan kekhawatiran dari aktor regional dan internasional, mencerminkan kompleksitas dinamika keamanan kawasan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman peran China dalam geopolitik regional dan dampaknya terhadap stabilitas serta kepentingan negara-negara terkait.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, PLAN & Pangkalan Dukungan Angkatan Laut PLA

CHINA'S PLAN PLACEMENT AT NAVAL SUPPORT BASE DJIBOUTI 2017-2020 AS A SECURITY STRATEGY

Abstract

Djibouti hosts military installations from the USA, France, Japan, Italy, and China due to its strategic location. China became the fifth country with military presence in Djibouti, stationing the People's Liberation Army Navy (PLAN) at a naval support base in 2017. This deployment marks a significant shift in regional and global security dynamics. Using qualitative methods and Donald E. Neuchterlein's concept of "national interest," this study analyzes the factors behind PLAN's deployment, such as PLA modernization, China's maritime strategy, Africa's security conditions, and economic interests. It highlights China's growing military presence in strategic regions and its efforts to protect maritime trade routes. Additionally, the PLAN's presence has drawn responses from regional and international actors, reflecting the complex security dynamics in the region. This research contributes to understanding China's role in regional geopolitics and its impact on the stability and interests of related countries.

Keywords: National Interests, PLAN & PLA Naval Support Base

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Kevin Hakim Pramudya, Tendy

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Terusan Suez di Mesir, Afrika menjadi salah satu jalur penting bagi pelayaran dan perdagangan dunia, sebab menghubungkan Eropa dengan Asia melalui Laut Mediterania dan Laut Merah. Menurut *Suez Canal Authority* (SCA), sekitar 1,27 miliar ton kargo melewati Terusan Suez dan menghasilkan keuntungan bagi Mesir sebanyak 6,3 miliar USD dari biaya transit pada tahun 2021 (TRT World, 2022). Tidak hanya menguntungkan Mesir, Terusan Suez juga menguntungkan negara-negara di sekitarnya yang memanfaatkan sektor laut untuk memperoleh keuntungan, seperti Djibouti. Djibouti merupakan negara di Afrika Timur dengan letak geografis strategis, sebab berdekatan dengan Terusan Suez, Mesir dan menjadi penghubung Samudera Hindia, Teluk Aden dan Laut Merah. Hal ini membuat Djibouti juga dilalui dan disinggahi oleh kapal-kapal dari dan menuju Terusan Suez. Setiap tahunnya, kapal - kapal perdagangan Asia-Eropa senilai sekitar US\$ 700 miliar melakukan transit di Djibouti dan 9% diantaranya merupakan kapal perdagangan minyak global (Ragas, 2021; 2). Namun, Djibouti memiliki keterbatasan pada sumber daya alam dan minimnya kapasitas industri dalam negeri, sehingga Djibouti mengandalkan sektor jasa berupa pelabuhan transit, pusat *transshipment*, pengisian bahan bakar kapal, serta berperan menjadi re-ekspor dan re-impor bagi negara *landlocked* seperti Ethiopia yang menyumbang 70% kegiatan pelabuhan Djibouti (CIA, 2021). Kegiatan re-ekspor dan re-impor untuk Ethiopia menyumbang pendapatan bagi Djibouti sebesar US\$ 1 miliar/tahun.

Adanya potensi dari letak geografis yang strategis, berbanding terbalik dengan adanya ancaman keamanan di sekitar Djibouti berupa perompak Somalia dan kelompok teror Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaeda (Surya, 2020; 44-45). Hal ini menjadi tantangan bagi Djibouti yang memiliki keterbatasan pada kapasitas militernya dalam menjaga wilayahnya, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut dan untuk memperoleh keuntungan, Djibouti menyewakan sebagian wilayahnya kepada negara asing seperti Amerika Serikat (AS), Prancis, Jepang, Italia dan Cina untuk dijadikan lokasi instalasi militer asing (Downs et.al, 2017; 7). Cina menjadi negara kelima yang mendirikan instalasi militer di Djibouti pada tahun 2016 dan beroperasi pada tahun 2017 dengan fokus operasi "*military operations other than war* (MOOTW)". Selain menghadapi tantangan berupa keberadaan perompak Somalia dan kelompok teror di sekitar Djibouti, pada tahun 2020, Cina juga dihadapkan tantangan berupa keberadaan pandemi COVID-19. Dengan kondisi yang ada di Djibouti, dimana terdapat kekuatan militer negara lain, seharusnya membuat Pemerintah Cina berfokus untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah teritorialnya. Namun, Pemerintah Cina justru memilih untuk membangun kekuatan dan keamanan di Djibouti yang bukan merupakan wilayah teritorialnya dengan menempatkan PLAN di *naval support base*. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Cina menempatkan PLAN di *naval support base*, Djibouti?

Konsep *National Interest*

Dalam *British Journal of International Studies* oleh Cambridge University Press (1976), Donald E. Nuechterlein memaparkan bahwa *national interest* merupakan kebutuhan serta keinginan suatu negara berdaulat dengan negara berdaulat lainnya yang dihasilkan dari adanya proses politik yang dilakukan oleh suatu negara.

Menurut Donald E. Nuechterlein terdapat 4 klasifikasi kepentingan untuk menentukan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kepentingan nasional suatu negara, yaitu:

- 1) *Defence interests*, bertujuan untuk melindungi negara beserta warga negara dari ancaman kekerasan secara langsung yang dilakukan oleh pihak luar baik *state actor* maupun *non-state actor* terhadap sistem pemerintahan di suatu negara.
- 2) *Economic interests*, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara lain.
- 3) *World Order interests*, bertujuan untuk memelihara sistem politik internasional dan sistem ekonomi yang mengakibatkan timbulnya rasa aman terhadap suatu negara. Hal ini ditandai

dengan bebasnya warga negara maupun korporasi suatu negara yang dapat beroperasi melakukan aktivitas ekonomi secara aman di luar teritori negara asal.

- 4) *Ideological interests*, bertujuan untuk melindungi dan melanjutkan serta menyebarkan nilai-nilai maupun ideologi yang dipercayai oleh penduduk suatu negara dan dipercayai memiliki kebaikan secara universal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian pada jurnal ini adalah eksplanatif, sebab menjelaskan langkah Cina dalam melindungi kepentingannya dengan menempatkan PLAN di Djibouti. Adapun jenis data adalah data kualitatif dan menggunakan sumber data primer yang berasal dari *website* pemerintah dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, maupun artikel-artikel di internet. Teknik pengumpulan data pada jurnal ini adalah studi pustaka atau *library research*, sehingga data-data yang dihimpun berasal dari literatur terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang telah dihimpun, diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menghubungkan data-data yang ada hingga memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan pada penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penempatan Plan (*People's Liberation Army Navy*) Cina Di *Naval Support Base*, Djibouti Tahun 2017-2020

Faktor-Faktor Penempatan PLAN di *PLA Naval Support Base*, Djibouti

Modernisasi *People's Liberation Army (PLA)*

Sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, Cina memiliki ambisi untuk menjadi negara yang lebih maju, baik dalam segi kekuatan, kesejahteraan dan kepemimpinan dalam tatanan global, yang disebut oleh Presiden Cina, Xi Jinping sebagai "*The Chinese Dream*" (US Secretary of Defense, 2020; 2). Dalam segi kekuatan, *The Central Military Commission* (CMC) dan Kementerian Pertahanan Nasional Cina membentuk serangkaian kebijakan dan strategi militer untuk mendukung modernisasi PLA menjadi "*world-class military*" yang sejalan dengan tujuan "*The Chinese Dream*" (US Secretary of Defense, 2020; 27). Adapun bentuk modernisasi pada PLA meliputi peningkatan anggaran pertahanan, peremajaan alat tempur, mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dan perubahan doktrin serta susunan struktural pada PLA (US Secretary of Defense, 2020; 38-39).

Anggaran pertahanan Cina mengalami peningkatan secara signifikan sebesar CN¥ 945,37 miliar dalam 11 tahun terakhir (2013-2024), pada 2013 anggaran pertahanan Cina sebesar CN¥ 720,17 miliar dan menyentuh angka CN¥ 1.665 miliar pada tahun 2024 (CSIS, 2024). Untuk mendukung PLA menjadi "*world-class military*", terdapat doktrin "*offshore water defense*" with "*open seas protection*" pada *China Defense White Paper* (2015)" untuk PLAN, dengan tujuan meningkatkan kemampuan tempur laut multifungsi serta efisien (The State Council Information of the PRC, 2015; 13). Adapun rencana "*world-class military*" pada PLA tercantum pada *China Defense White Paper* tahun 2019, dengan detail sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2020, "Mampu mencapai mekanisasi peningkatan informasi secara signifikan dan kemampuan strategis yang lebih baik".
- 2) Pada tahun 2035, "Meningkatkan modernisasi pada ilmu militer, struktur organisasi, personel militer, persenjataan dan peralatan secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan modernisasi yang dibentuk oleh negara dan dapat menyelesaikan modernisasi pertahanan nasional serta militer."
- 3) Pada tahun 2049, "Mentransformasi angkatan bersenjata rakyat (PLA) menjadi angkatan bersenjata kelas dunia (*world-class military*) secara utuh."

Keberadaan doktrin “*offshore water defense*” with “*open seas protection*” sejalan dengan adanya pembangunan armada modern *multi-role platform* serta pengembangan persenjataan dan sensor pada armada PLAN. Adanya modernisasi dan rencana “*world-class military*” membuat PLAN menjadi angkatan laut terbesar setelah AS dengan kekuatan armada sebanyak 350 kapal perang permukaan dan kapal selam (US Secretary of Defense, 2020; 44-47). Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya kemampuan operasi PLAN dari “*green-water navy*” menjadi “*blue-water navy*”². Selain itu, pada tahun 2016, Cina mendirikan instalasi militer luar negeri pertama di Djibouti, yaitu PLA *naval support base* dan dioperasikan oleh PLAN pada tahun 2017.

Keberhasilan Cina dalam mendirikan PLA *naval support base* di Djibouti didasari oleh baiknya hubungan diplomatik Cina-Djibouti, dimana PLAN mendapatkan akses ke pelabuhan-pelabuhan milik Djibouti, setelah terjadinya pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan Cina, Jenderal Chang Wanquan dengan Presiden Djibouti, Ismail Omar Guelleh pada tahun 2014 (Downs et. al, 2017; 23-24). Pemberian akses terhadap pelabuhan di Djibouti menjadi awal mula diizinkan nya pembangunan PLA *naval support base* di Djibouti, setelah Presiden Guelleh mengemukakan *statement* menerima kehadiran instalasi militer PLAN untuk keamanan Internasional (CGTN, 2017). PLA *naval support base* berdiri di lahan seluas 36 hektar dan menghabiskan dana sekitar US\$ 590 miliar serta biaya sewa lahan sebesar US\$ 20 juta untuk 10 tahun (Hellström, et. al, 2019: 53). PLA *naval support base* juga memiliki fasilitas berupa rumah sakit, *vehicle and rail depot*, penampungan bahan bakar, ruang bawah tanah seluas 23.000 m², barak dengan kapasitas sekitar 2.000 personel, 8 hangar untuk helikopter dan *unmanned aerial vehicle* (UAV) serta dermaga dengan panjang keseluruhan mencapai 1.200 meter yang dapat menampung armada PLAN, kecuali kapal induk *Liaoning* dan kapal *landing platform dock* (LPD) tipe 071 *Yuzhao* (Downs et. al, 2017; 26).

Keberadaan PLA *naval support base* bertujuan untuk mendukung partisipasi Cina pada *counter-piracy operation* di Teluk Aden sejak tahun 2009. Adapun gugus tugas PLAN dalam operasi ini terdiri dari 3-4 kapal berjenis *frigate*, *destroyer*, & *replenishment ship* (PLA Daily, 2018). Keputusan Cina menyebut instalasi militer ini sebagai *support base* atau *logistic facilities* dapat dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian pihak Beijing terkait stabilitas di kawasan, mengingat setidaknya terdapat 4 negara lain yaitu Amerika Serikat (AS), Prancis, Jepang dan Italia yang memiliki instalasi militer di Djibouti. Hal ini dipertegas oleh pernyataan juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Kolonel Wu Qian, bahwa fungsi serta tujuan utama PLA *naval support base* adalah untuk menyediakan logistik dan membantu mobilitas PLAN dalam operasi *anti-piracy* dan operasi-operasi kemanusiaan, seperti Operasi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Chaziza, 2018; 6).

Aktivitas Keamanan-Ekonomi Cina Di Kawasan

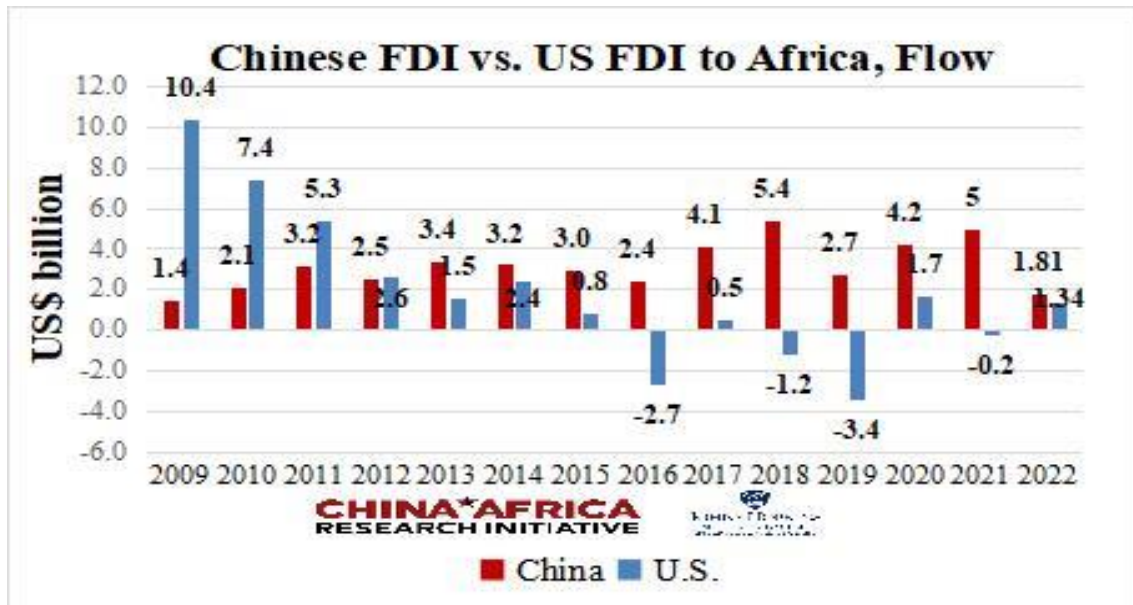
Kehadiran Cina pada bidang keamanan di kawasan Afrika dan Timur Tengah melalui keikutsertaan PLAN pada *anti-piracy operation* di Teluk Aden dan keberadaan kontingen khusus yang terdiri dari PLA dan *People's Police of China* (PPC) dalam Operasi Perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik di Afrika seperti Sudan Selatan (tergabung ke dalam UNMISS), Republik Demokratik Kongo (MONUSCO), Sudan (UNISFA), dan Sahara Barat (MINURSO) sejak tahun 1990 (CFR, 2021). Selain terlibat dalam bidang keamanan, Cina secara aktif juga terlibat dan meningkatkan kehadirannya pada bidang ekonomi dengan negara-negara di Afrika.

Bersama dengan negara-negara Afrika, Cina mendirikan *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC) pada tahun 2000, yang merupakan organisasi kemitraan multilateral dengan tujuan melakukan pembangunan politik, *soft power*, dan ekonomi. Adapun fokus FOCAC terbagi ke dalam 3 fase yang berbeda, antara lain:

- 1) Fase 1 (2000-2006), berfokus dalam bidang perdagangan dan menghasilkan tarif gratis ekspor-impor.
- 2) Fase 2 (2006-2015), melakukan berbagai kerjasama ekonomi seperti *foreign direct investment* (FDI), bantuan luar negeri, pembiayaan langsung, dan masuknya program investasi infrastruktur Cina, yaitu *belt and road initiative* (BRI).

- 3) Fase 3 (2015-2021), mengutamakan kemitraan pada pembangunan sektor keamanan dan politik, yang dibuktikan dengan kehadiran PLA *naval support base* di Djibouti pada tahun 2017 (The London School of Economics and Political Science, 2022).

Kehadiran Cina pada sektor ekonomi di Afrika meningkat secara signifikan dan dominan saat terjadinya fase 2. Hal ini disebabkan oleh jumlah FDI Cina ke Afrika yang perlahan lebih besar dari jumlah FDI AS ke Afrika, yaitu sebesar US\$ 44,1 miliar (Cina) dan US\$ 26,44 miliar (AS), dengan detail sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Perbandingan FDI Cina-US Ke Afrika

Sumber: China Africa Research Initiative, 2023.

Meningkatnya FDI Cina ke Afrika berdampak pada Cina menjadi partner ekonomi terbesar di Afrika dan kehadiran 10.000 perusahaan-perusahaan asal Cina di Afrika perusahaan. Ekspansi perusahaan ini tak hanya menguntungkan Cina, namun juga bagi Afrika, sebab juga menyerap tenaga kerja lokal (McKinsey, 2017). Selain itu, sejak tahun 2000-2020, Cina memberikan pinjaman lunak/utang terhadap 49 negara dan 7 institusi regional di Afrika dengan total US\$ 169,9 miliar (China-Africa Research Initiative, 2022).

Hadirnya program BRI pada tahun 2013 juga melibatkan negara-negara di Afrika, salah satunya Djibouti, yang merupakan salah satu anggota FOCAC dan menjadi lokasi dari PLA *naval support base*. Keikutsertaan Djibouti menjadi penting bagi BRI, terutama pada sektor *maritime silk road* (MSR), sebab Djibouti berperan menjadi penghubung Asia (Cina) dengan Afrika hingga Eropa dan menjadi akses masuk secara lebih luas ke seluruh Afrika. Adapun total investasi BRI di Djibouti adalah sebesar US\$ 1,34 miliar dan dipergunakan untuk berbagai proyek-proyek infrastruktur, seperti:

- 1) *Doraleh Multipurpose Port* (DMP), alokasi dana sebesar US\$ 340 juta.
- 2) Modernisasi kereta api Ethiopia-Djibouti, alokasi dana sebesar US\$ 514 juta.
- 3) Jalur pipa air Ethiopia-Djibouti, alokasi dana sebesar US\$ 320 juta.
- 4) Pembangunan gedung perkantoran, alokasi dana sebesar US\$ 70 juta.
- 5) Pelabuhan Ghoubet, alokasi dana sebesar US\$ 64 juta.
- 6) Djibouti *International Free Trade Zone* (DIFTZ), alokasi dana sebesar US\$ 30 juta.

Keikutsertaan Djibouti dalam BRI/MSR dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah Djibouti dalam mewujudkan program *Vision 2035*, yang bertujuan menjadikan Djibouti sebagai pusat komersial seperti Dubai dan Singapura di kawasan Afrika (Mwatela dan Changfeng, 2016; 23). Selain

melakukan pendanaan, proyek-proyek yang ada di Djibouti juga dikerjakan dan menggunakan jasa serta material dari perusahaan-perusahaan asal Cina (Backaler, 2014; 41). Serta pada proyek pelabuhan DMP-DIFTZ menggunakan *blue print* dari kota Shekou, di Cina agar menjadikan Djibouti sebagai “*port-park city*”, serta pada modernisasi kereta api Ethiopia-Djibouti menggunakan standar dan teknologi asal Cina (Blanchard, J., 2021; 123).

Stabilitas Kawasan Afrika-Timur Tengah

Meningkatnya kehadiran Cina melalui sektor keamanan dan ekonomi di Afrika-Timur Tengah, berdampak pada jumlah warga negara Cina yang diperkirakan mencapai masing-masing 1 juta warga negara Cina di Afrika dan Timur Tengah (Wang, 2018). Keberadaan warga negara Cina di kawasan yang memperoleh indeks kurang stabil serta kurang damai dari *Global Peace Index* (GPI) tahun 2017 dengan nilai indeks sebesar 2.243 untuk Afrika Sub-Sahara dan nilai indeks sebesar 2.559 untuk *middle east and north africa* (MENA) tentu menjadi perhatian dan faktor pendorong bagi Pemerintah Cina untuk menempatkan PLAN di Djibouti (Institute for Economics and Peace, 2017; 19-20).

Terpilihnya Djibouti sebagai lokasi PLA *naval support base* dilatarbelakangi oleh kondisi Djibouti yang cukup stabil dan damai jika dibandingkan dengan rerata negara-negara di Afrika, dengan nilai indeks sebesar 2.196. Walaupun memiliki nilai indeks yang baik, Djibouti dikelilingi oleh negara-negara dengan indeks stabilitas yang kurang baik seperti yang tertera pada tabel di atas. Adapun negara-negara yang berbatasan dengan Djibouti dan memiliki konflik di dalam negaranya, yaitu:

- 1) Yaman, mengalami instabilitas akibat perang saudara setelah pengambilalihan Ibu Kota Yaman, Sana'a oleh kelompok milisi Houthi pada tahun 2014. Houthi juga menyerang kapal-kapal yang melintasi wilayah perairan Selat Bab El-Mandeb dan Teluk Aden (CFR, 2023).
- 2) Ethiopia, mengalami instabilitas dan perang saudara akibat perebutan kekuasaan antara otoritas bersenjata di Ethiopia (Halawa, 2022; 19).
- 3) Somalia, mengalami instabilitas akibat peperangan Ogaden dengan Ethiopia pada masa pemerintahan Siad Bare. Instabilitas menyebabkan jatuhnya perekonomian warga yang diikuti oleh meningkatnya aktivitas kriminal oleh warga Somalia, yaitu adanya kelompok teror Al-Shabaab yang menguasai sebagian besar wilayah Somalia tengah dan selatan, serta aktivitas perompak Somalia di wilayah perairan Selat Bab El-Mandeb dan Teluk Aden (Venugopalan, 2017: 9).

Adanya aktivitas perompak di Selat Bab El-Mandeb dan Teluk Aden menjadi ancaman keamanan dan ekonomi bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut, mengingat kedua wilayah tersebut merupakan jalur vital bagi pelayaran, perdagangan dan ekonomi global. Adapun detail terkait aktivitas perompak di kawasan Afrika Timur dan Laut Arab, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Trend Kasus Perompakan (2009-2023)

Sumber: IMO, 2009-2023.

Dalam 14 tahun (2009-2023) terdapat total 946 kasus penyerangan dan perompakan, dimana 39 diantaranya melibatkan kapal-kapal berbendera Cina dan Hong Kong (IMO, 2009-2023). Berdasarkan grafik di atas, jumlah kasus penyerangan dan perompakan mengalami penurunan secara signifikan dan terkendali sejak tahun 2012 hingga 2022. Hal ini dampak dari kerjasama koalisi angkatan laut internasional (termasuk PLAN) dalam melakukan *anti-piracy operation* di Teluk Aden.

Namun, adanya eskalasi konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023, setelah Hamas melakukan serangkaian serangan roket terhadap Israel berdampak pada meningkatnya kasus penyerangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah menjadi 43 kasus. Serangan ini dilakukan oleh kelompok milisi Houthi dan kelompok milisi yang didukung Iran dengan menyasar kapal-kapal yang terindikasi memiliki hubungan dengan Israel dan menyerang armada angkatan laut AS di kawasan Laut Merah (CFR, 2024). Memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, tentu membuat koalisi angkatan laut internasional (termasuk PLAN) terus dan meningkatkan aktivitas patroli bersama untuk menjaga kapal-kapal yang melintasi wilayah Teluk Aden dan Laut Merah.

Kepentingan Nasional Cina

Defence Interest

Kepentingan pertahanan Cina dalam menempatkan PLAN di PLA *naval support base*, Djibouti berkaitan dengan keberadaan warga negara Cina di Afrika dan Timur Tengah yang mencapai 2 juta jiwa, keselamatan kapal-kapal berbendera Cina dan Hong Kong, serta aset-aset Cina. Dengan fokus operasi MOOTW, PLAN melakukan operasi-operasi militer, seperti: (1) *counter-terrorism operation* dan memelihara stabilitas; (2) melindungi hak dan kepentingan maritim; (3) *counter-piracy operation* dan pengawalan jarak jauh; (4) *humanitarian assistance and disaster response (HA/DR) operation*; (5) *non-combatant evacuation operation (NEO)*; (6) Memelihara perdamaian internasional; (7) melakukan latihan bersama berskala internasional dan diplomasi militer (Siebens dan Lucas, 2022; 23).

Sepanjang mengikuti *anti-piracy operation* sejak tahun 2009 di Teluk Aden, PLAN telah melakukan pengawalan terhadap 6.000 kapal dan penyelamatan terhadap 60 kapal dari berbagai negara, termasuk Cina (Cheng, 2019; 5). Sejalan dengan operasi-operasi MOOTW, Cina melakukan misi penyelamatan dan evakuasi terhadap warga negaranya dan negara lain saat terjadinya konflik di beberapa negara, seperti:

- 1) Libya (2011), Cina berhasil mengevakuasi 30.000 warga negara Cina dan 2.100 warga negara asing dengan mengerahkan 1 armada PLAN berupa kapal frigate tipe 530 *Xuzhao*, 4 pesawat Ilyusin (IL)-76 milik *People's Liberation Army Air Force* (PLAAF), dan menyewa pesawat sipil, kapal pesiar dan kapal dagang (Siebens dan Lucas, 2022; 26).
- 2) Yaman (2015), Cina berhasil mengevakuasi 629 warga negara Cina dan 279 warga negara asing dengan mengerahkan 3 armada PLAN, yaitu 2 kapal frigate tipe 547 *Linyi* dan tipe 550 *Weifang*, serta 1 kapal suplai tipe 887 *Wieshan Hu* (Hurst, 2017; 34).
- 3) Ethiopia (2020), Cina melalui Kementerian Luar Negeri Cina dan Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia, berhasil mengevakuasi 600 warga negara Cina yang berprofesi sebagai pekerja pada proyek teknik dan kawasan industri di Tigray, Ethiopia (SCMP, 2020).
- 4) Sudan (2023), Cina berhasil mengevakuasi 1.300 warga negara Cina dan warga negara asing dengan mengerahkan 2 armada PLAN, yaitu 1 kapal *destroyer* tipe 162 *Nanning* dan 1 kapal suplai tipe 887 *Weishanhu* (SCMP, 2023).

Tidak terlibatnya PLA secara aktif dan langsung pada misi evakuasi tahun 2020 di Ethiopia, disebabkan Cina tetap mempertahankan doktrin non-intervensi pada kebijakan luar negerinya. Doktrin non-intervensi juga berlaku dalam melindungi berbagai aset-aset ekonomi Cina di Afrika, sebab Cina memilih menggunakan *private security company* (PSC) Cina dan menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan otoritas keamanan negara tuan rumah (Siebens dan Lucas, 2022; 49). Selain menjaga keamanan, PSC Cina juga berperan sebagai konsultan militer dan mengumpulkan informasi penting terkait pelaksanaan program BRI/MSR di Afrika (The National Interest, 2021).

Keberadaan PLAN di Djibouti dalam melaksanakan operasi-operasi MOOTW dilatarbelakangi oleh upaya Cina dalam meminimalisir resiko meluasnya suatu konflik, mengingat instabilitas dan ketidakpastian geopolitik di kawasan Afrika dan Timur Tengah, serta besarnya kepentingan nasional Cina di Afrika.

Economic Interest

Besarnya kepentingan ekonomi Cina di Afrika merupakan dampak dari meningkatnya kehadiran Cina dalam sektor ekonomi di Afrika melalui FOCAC. Instabilitas dan ketidakpastian pada geopolitik di Afrika dan Timur Tengah, membuat Cina melakukan tindakan preventif untuk jangka panjang agar mencegah timbulnya kerugian bagi kepentingan ekonomi Cina di kawasan dengan menempatkan PLAN di PLA *naval support base*, Djibouti yang memiliki fokus operasi MOOTW. Adanya kerugian ekonomi dari aktivitas perompak diperkirakan mencapai US\$ 16 miliar/tahun (Desai dan Shambaugh, 2021; 1). Pengawalan dan patroli yang dilakukan koalisi angkatan laut internasional (termasuk PLAN) bertujuan untuk menghilangkan hambatan dan menjamin keamanan serta kelancaran aktivitas perekonomian global, mengingat wilayah Teluk Aden merupakan jalur vital bagi perdagangan dunia (Cheng, 2019; 4).

Terkendalnya kasus perompakan di wilayah Teluk Aden berdampak pada meningkatnya nilai ekspor Cina ke Afrika (termasuk Djibouti). Sebagai perbandingan, saat kasus perompakan masih tinggi (2009-2012) total ekspor Cina ke Afrika sebesar US\$ 265,5 miliar & ke Djibouti sebesar US\$ 2,15 miliar. Sedangkan pada saat kasus terkendali (2013-2022), total ekspor Cina ke Afrika adalah sebesar US\$ 872,54 miliar dan Djibouti sebesar US\$ 14,81 miliar (China-Africa Research Initiative, 2023). Selain mendapatkan keuntungan dari sektor perdagangan, keberadaan perusahaan-perusahaan Cina di Afrika yang bergerak di berbagai sektor juga menjadi penyumbang keuntungan ekonomi Cina, dengan total keuntungan tahunan adalah sebesar US\$ 180 miliar (Sun et. al, 2017; 10&30). Dengan status Cina sebagai partner ekonomi terbesar bagi Afrika, tentu jumlah keuntungan dari korporasi Cina di Afrika dapat meningkat melalui 2 skenario berikut:

- 1) Keuntungan meningkat ke angka US\$ 250 miliar di tahun 2025, ketika korporasi asal Cina tetap bertahan di sektor-sektor yang telah ada (sektor manufaktur, jasa, perdagangan, konstruksi-*real*

estate, dan pertambangan) pada pangsa pasar mereka di Afrika, seiring mengimbangi peningkatan ekonomi di Afrika.

- 2) Korporasi asal Cina dapat memperoleh keuntungan drastis, diperkirakan mencapai US\$ 440 miliar ketika menerapkan strategi bisnis yang telah berhasil di Cina pada pasar Afrika dan melakukan perluasan pada sektor baru seperti pertanian, perbankan-keuangan, perumahan, teknologi-telekomunikasi, serta transportasi dan logistik (McKinsey, 2017; 13).

Adapun upaya untuk mendukung terus berjalannya aktivitas perekonomian Cina di Afrika adalah dengan menyediakan infrastruktur untuk menjamin kelancaran pendistribusian komoditas, sehingga Cina melakukan investasi infrastruktur BRI di 48 negara-negara Afrika, termasuk di Djibouti (Green Finance & Development Center, 2023). Sebaran proyek-proyek BRI/MSR di Afrika terfokus pada pembangunan dan modernisasi sektor pelabuhan dan konektivitas pendistribusian komoditas pada jalur darat menggunakan jalur kereta api, termasuk di Djibouti. Djibouti memiliki peran yang signifikan dan penting dalam kelangsungan MSR di kawasan Afrika bahkan global, sebab posisi geo-strategisnya dan wilayah perairannya yang termasuk jalur perdagangan global. Cina melihat geo-strategis yang dimiliki oleh Djibouti sebagai akses menuju dan menjangkau wilayah Afrika yang lebih luas, terutama untuk menjangkau mitra-mitra dagang utama Cina di kawasan Afrika (Ragas, 2021; 4). Selain melakukan pendanaan terhadap proyek-proyek infrastruktur di Djibouti, Cina juga memiliki saham sebesar 23,5% pada otoritas pelabuhan Djibouti, yaitu *Djibouti Ports & Free Trade Zone Authority* (DPFZA) (Blanchard, J., 2021; 122). Selain melakukan investasi pada sektor infrastruktur melalui BRI/MSR, Cina juga melakukan investasi pada sektor minyak dan gas di Ethiopia melalui BUMN Cina, yaitu *Poly-GCL Petroleum Group Holdings Limited* pada tahun 2019. Adapun bentuk investasi yang dilakukan Cina adalah membangun pipa gas dari Ethiopia menuju Djibouti sepanjang 767 km dengan total investasi senilai US\$ 4 miliar (Zubaraoil, 2021).

Masifnya aktivitas ekonomi Cina di Afrika tentu mampu meningkatkan pengaruh dan pendapatan ekonomi Cina di Afrika, termasuk di Djibouti. Namun, terdapat beberapa tantangan ekonomi yang dihadapi Cina di Djibouti, seperti:

- 1) Potensi korupsi, Djibouti menjadi negara di urutan 23 dari 300 negara yang memiliki indeks korupsi tertinggi di dunia (The World Bank, 2024). Hal ini didasarkan oleh praktik korupsi pejabat pemerintahan berupa suap, "syarat tambahan" dengan menyewa rumah-rumah milik pejabat, dan nepotisme dengan menerima kerabat maupun kolega sebagai karyawan untuk mendapatkan izin maupun kontrak pengadaan dari Pemerintah Djibouti (McKinsey, 2017).
- 2) Potensi kegagalan Djibouti membayar utang, hal ini didasarkan oleh faktor besarnya utang luar negeri Djibouti terhadap Cina yang mencapai US\$ 1,5 miliar atau sebanding dengan 50% dari pajak domestik bruto (PDB) Djibouti, yaitu US\$ 3.18 miliar dengan pertumbuhan ekonomi 1,2% pada tahun 2020 (Boston University, 2022) Menurut *International Monetary Fund* (IMF), pinjaman non- konsensi Cina terhadap Djibouti dikhawatirkan tidak bertahan dalam jangka panjang, karena lemahnya basis fiskal Djibouti untuk menangani pinjaman secara efektif (Blanchard, J., 2021; 123-124).
- 3) Kekhawatiran pada faktor keamanan, hal ini didasarkan oleh ancaman keamanan di kawasan Afrika dan Timur Tengah akibat instabilitas politik. Walaupun Djibouti memiliki kondisi yang stabil, terdapat aktivitas kriminal transnasional seperti perdagangan manusia, senjata ilegal dan narkoba di Djibouti, sehingga membuat Djibouti berada di urutan 120 dari 193 negara di dunia dengan indeks kriminalitas sebesar 4,65 (Global Organized Crime Index, 2023).

World Order Interest

Meningkatnya kehadiran Cina di Afrika menjadi upaya Cina untuk mencapai kepentingan tatanan dunia. Dampak kebijakan FOCAC fase 1 dan 2, berhasil membuat Cina menjadi partner ekonomi terbesar Afrika yang berdampak pada tergesernya pengaruh Prancis pada sektor perdagangan di mayoritas negara-negara Afrika dalam 2 dekade terakhir (2000-2020) (Statista, 2021). Pada fase 3

(2015-2021), FOCAC membentuk sub-forum pada sektor pendidikan, hukum, pembangunan desa, media, serta pendampingan politik terhadap negara-negara anggota (melalui pendampingan pembangunan ekonomi-politik berbasis karakteristik nasional masing-masing negara). Pada fase ini, Cina juga memberikan beasiswa pendidikan politik terhadap pemimpin-pemimpin politik Afrika yang serupa dengan program *Harvard Kennedy School* milik AS (The London School of Economics and Political Science, 2022). Selain melalui FOCAC, Cina juga meningkatkan pengaruhnya di PBB dengan meningkatkan jumlah pasukan dalam Operasi Perdamaian PBB dan menjadi penyokong dana terbesar setelah AS. Dalam pendekatan multilateralnya, Cina juga meningkatkan pengaruhnya di Uni Afrika (UA) dengan memberi bantuan militer senilai US\$ 100 juta pada tahun 2018 serta memberikan bantuan alat pelindung diri dan alat medis kepada pemerintah di negara-negara Afrika pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi COVID-19 (Devermont et. al, 2021; 2-30).

Sebagai upaya dalam pembangunan sektor politik dan keamanan di Afrika, Cina bersama anggota FOCAC membentuk *China-Africa Peace and Security* pada tahun 2018 untuk mendukung program-program dibidang hukum, penjaga perdamaian, *anti-piracy*, dan *counter-terrorism*. Terbentuknya sub-forum ini, berkaitan dengan hadirnya PLAN di Djibouti yang menjalankan fokus operasi bersifat MOOTW dan sejalan dengan program-program *China-Africa Peace and Security* (Blanchard, L., dan Collins, 2019; 1). Kehadiran dan fokus operasi yang dilaksanakan PLAN di Djibouti menjadi upaya bagi Cina untuk meningkatkan pengaruh serta posisi Cina dan memenuhi tanggung jawabnya pada dunia internasional dalam menjaga perdamaian dunia (China Military, 2023). Hal ini sejalan dengan usaha Cina untuk membentuk citra positif dan damai bagi dunia internasional, sebab keberadaan PLAN di *PLA naval support base*, Djibouti hanya bersifat defensif untuk melindungi kepentingannya yang sedang berkembang dan tidak bertujuan untuk melakukan ekspansi militer (Blanchard, J., 2021; 121). Walaupun bersifat defensif, kehadiran PLAN di Djibouti tentu menjadi proyeksi kekuatan militer Cina, sebab Cina dapat berperan secara aktif dan responsif terhadap ketidakpastian dan potensi timbulnya krisis serta konflik di Afrika, Timur Tengah, hingga kawasan Samudera Hindia (Chaziza, 2018; 11).



Gambar 3. Instalasi Militer Asing di Afrika

Sumber: FOI, 2019.

Posisi militer Cina di Afrika dikelilingi oleh besarnya hegemoni militer AS beserta sekutu, seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sehingga, langkah Cina dalam mendefinisikan *PLA naval support base* sebagai *support facilities* dan fokus operasi MOOTW adalah langkah yang tepat untuk meredakan ketegangan serta potensi konflik kepentingan dengan AS-sekutu di Afrika. Namun, hal ini tidak

serta merta menghilangkan kekhawatiran AS terhadap Cina, sebab AS menganggap Cina sebagai ancaman terhadap eksistensi dan kepentingan mereka di kawasan. Pada tahun 2018, Cina dan AS terlibat insiden berupa adanya klaim serangan laser dari PLA *naval support base* oleh militer AS terhadap pilot pesawat militer AS. Tuduhan AS atas serangan tersebut dibantah oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, melalui investigasi internal Cina (Blanchard, L., dan Collins, 2019; 2). Kekhawatiran AS terhadap Cina juga disebabkan oleh dekatnya jarak PLA *naval support base* dengan *Camp Lemonnier* milik militer AS yang hanya berjarak 13 kilometer, sehingga rawan menimbulkan potensi spionase dari intelijen Cina terhadap AS serta sekutu di Afrika (Downs dkk, 2017; 31).

Disamping itu, potensi kegagalan Djibouti dalam membayar utang luar negeri Cina menambah kekhawatiran AS akan kehilangan akses terhadap pelabuhan-pelabuhan di Djibouti, sebab, selain memegang mayoritas utang luar negeri Djibouti, Cina juga memiliki saham sebesar 23,5% pada otoritas pelabuhan Djibouti, DPFZA. Kekhawatiran AS didasarkan oleh kasus gagalnya Pemerintah Sri Lanka pada tahun 2017 dalam membayar utang Cina yang berdampak pada pengambilalihan pelabuhan Hambantota oleh Cina (The Atlantic, 2021). Adanya tensi antara AS-Cina dipengaruhi oleh rivalitas kedua negara dalam skala global, dimana AS-Cina terlibat dalam “perang dagang” setelah AS menjatuhkan sanksi tarif dan pembatasan impor dari Cina pada tahun 2018 di masa administrasi Presiden Donald Trump (Huang, 2021; 1). Selain itu, adanya jumlah FDI Cina yang melampaui FDI AS ke Afrika, membuat AS membentuk program “*Prosper Africa*” dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah investasi dan perdagangan ke Afrika, hal ini dapat dilihat sebagai upaya AS dalam mempertahankan pengaruhnya di Afrika (CNBC, 2019). Program “*Prosper Africa*” berhasil meningkatkan FDI AS ke Afrika sebesar US\$ 1,34 miliar. Walaupun terlibat dalam rivalitas dan adanya tensi antara Cina dengan AS- sekutu, kedua belah pihak tetap mempertahankan tensi maupun ketegangan dan berupaya untuk menjaga stabilitas di kawasan Afrika. Hal ini dibuktikan melalui koordinasi, pertukaran informasi, hingga latihan gabungan selama *anti-piracy operation* di Teluk Aden. Setidaknya, angkatan laut AS dan Cina pernah melakukan latihan taktis gabungan di tahun 2014, serta pada 2018, Cina bersama CTF-465 *European Union* (EU) melakukan latihan medis bersama di kapal angkatan laut Italia dan PLA *naval support base*, Djibouti (Cheng, 2019; 9). Selain itu, saat perhelatan *Cutlass Express 2019*, Laksamana Muda Heidi Berg (AS) mengundang dan menyambut Komandan PLA, Liang Yang, pada pembukaan latihan gabungan antara militer AS dan negara-negara Afrika tersebut. Hal ini direspon positif oleh Cina, setelah pejabat PLAN turut mengundang Laksamana Muda Heidi Berg beserta jajarannya untuk mengunjungi kapal *destroyer* PLAN yang sedang bersandar di Djibouti. Adanya diplomasi militer antara AS dan Cina, merupakan cara untuk saling menghormati dan sedikit meredakan tensi kedua negara (CNN, 2019). Keikutsertaan PLAN dalam *anti-piracy operation* di Teluk Aden turut mendapat respon yang positif dari PBB dan negara-negara barat (termasuk AS), sebab objektivitas Cina saat melakukan operasi (Siebens dan Lucas, 2022; 35).

4. KESIMPULAN

Pendekatan multidimensional Cina di Afrika bertujuan untuk membentuk hubungan yang baik dan mendapatkan kepercayaan negara-negara di Afrika, sehingga dapat meningkatkan pengaruh serta daya tawar Cina di Afrika. Keberadaan PLAN di PLA *naval support base*, Djibouti serta pelaksanaan operasi-operasi MOOTW merupakan hasil perubahan doktrin dan modernisasi pada PLA yang juga menjadikan keamanan kepentingan luar negeri sebagai tugas strategis militer. Namun, adanya hal ini tidak membuat Cina meninggalkan doktrin non-intervensi pada politik luar negeri mereka, sebab Cina masih memilih untuk tidak selalu menerjunkan militernya secara aktif dan langsung dalam melindungi kepentingan luar negeri mereka. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Cina menggunakan PSC Cina di Afrika dan melakukan kerjasama dengan otoritas keamanan negara setempat dalam melindungi proyek-proyek BRI dan aset-aset milik Cina (baik milik negara maupun korporasi swasta asal Cina).

Penempatan dan melaksanakan operasi MOOTW oleh PLAN di PLA *naval support base*, Djibouti merupakan upaya Cina untuk membentuk citra yang positif dan memproyeksikan kekuatan militernya, sehingga hal ini sejalan dengan tujuan Cina mencapai “*The Chinese Dream*” yang menjadi kepentingan tatanan dunia bagi Cina. Selain itu, besarnya aktivitas dan kepentingan ekonomi Cina di Afrika, menjadi faktor dominan dalam penempatan dan pelaksanaan operasi MOOTW oleh PLAN di Djibouti, sebab Cina berupaya untuk menciptakan stabilitas bagi geo-politik dan geo-ekonomi di kawasan Afrika maupun Timur Tengah, sehingga dapat menjamin kelangsungan kepentingan ekonomi Cina secara lancar dalam jangka waktu yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Backaler, J. 2014. *China Goes West Everything You Need to Know About Chinese Companies Going Global*. 1st ed. United States of America: Palgrave Macmillan.
- Blanchard, L., P. & Collins, S., R. 2019. “China’s Engagement in Djibouti”. Congressional Research Service. Tersedia di: <https://sgp/fas/org/crs/row/IF11304.pdf>
- Blanchard, J., F. 2021. *China’s Maritime Silk Road Initiative, Africa, and the Middle East: Feats, Freezes, and Failures*. Palgrave Macmillan.
- Central Intelligence Agency World Factbook. n.d. Djibouti, dalam <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/djibouti/#economy>, diakses pada 12 Maret 2022.
- CFR. 2024. Global Conflict Tracker: Israeli-Palestinian Conflict, dalam <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>, diakses pada 13 Mei 2024.
- . 2023. Yemen Civil War, dalam <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen>, diakses pada 6 juni 2023. . 2021. What is Peacekeeping?, dalam <https://education.cfr.org/learn/reading/what-peacekeeping>, diakses pada 15 Mei 2023.
- CGTN. 2017. Exclusive Interview: Djibouti’s President on Ties with China, dalam https://news.cgtn.com/news/7755444d79637a6333566d54/share_p.html, diakses pada 1 Desember 2022.
- Chaziza, M. 2018. *China’s Military Base in Djibouti*. The Begin-Sadat Center for Strategic studies. Tersedia di: <https://besacenter.org/wp-content/uploads/2018/08/153-Chaziza-Chinas-Military-Base-in-Djibouti-web.pdf>. Cheng, C. 2019. “China and U.S. Anti-Piracy Engagement in the Gulf of Aden and Western Indian Ocean Region”. The Carter Center. Tersedia di <https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/china/trs-05-anti-piracy-engagement.pdf>
- China-Africa Research Initiative. 2023. Data of Chinese Activity in Africa, dalam <https://www.sais-cari.org/data-chinese-investment-in-africa>, diakses pada 25 mei 2023.
- CNBC. 2019. The US-China Trade Rivalry Is Underway In Africa, and Washington Is Playing Catch-Up, dalam <https://www.cnbc.com/2019/10/09/the-us-china-trade-rivalry-is-underway-in-africa.html>, diakses pada 8 Agustus 2023.
- CNN World. 2019. China and The United States Face Off in Djibouti as The World Powers Fight for Influence in Africa, dalam <https://edition.cnn.com/2019/05/26/africa/china-belt-road-initiative-djibouti-intl/index.html>, diakses pada 10 Oktober 2023.
- CSIS. 2024. China Power: What Does China Really Spend on its Military, dalam <https://chinapower.csis.org/military-spending/>, diakses pada 15 Januari 2023.
- Desai, R. M. & Shambaugh, G. E. 2020. “Measuring The Global Impact of Destructive and Illegal Fishing on Maritime Piracy: A Spatial Analysis”. *Plos One*. Vol. 16, No. 2
Tersedia di <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7904167/pdf/pone.0246835.pdf>
- Devermont, J., Harris, M., & Albelda, A. 2021. “Personal Ties: Measuring Chinese and U.S. Engagement with African Security Chiefs”. *CSIS Briefs*. Tersedia di <https://www.csis.org/analysis/personal-ties-measuring-chinese-and-us-engagement-african-security-chiefs>
- Downs, E., Becker, J., & Degategno, P. 2017. “China’s Military Support Facility in Djibouti: The Economic and Security Dimensions of China’s First Overseas Base”. Center for Naval Analyses. Tersedia di: https://www.cna.org/cna_files/pdf/DIM-2017-U-015308-Final3.pdf.
- Global Organized Crime Index. 2023. Djibouti, dalam <https://ocindex.net/2023/country/djibouti>, diakses pada 8 September 2023.

- Green Finance & Data Center. 2023. Countries of the Belt and Road Initiative (BRI), dalam <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/>, diakses pada 17 Juli 2023.
- Halawa, H., Balfour, R., Bomassi, L., dkk. 2022. "The Southern Mirror: Reflection on Europe From the Global South". Carnegie Europe. Tersedia di: https://carnegieendowment.org/files/Balfour_Bomassi_Martinelli_-_Southern_Mirror-v2.pdf
- Hellström, J., Gasinska, K., Bergenwall, S., dkk. 2019. "Foreign Military Base and Installations in Africa". Swedish Defence Research Agency. Tersedia di: <https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4658--SE>.
- Huang, Y. 2021. "The US-China Trade War Has Become a Cold War". Carnegie Endowment for International Peace. Tersedia di <https://carnegieendowment.org/2021/09/16/u.s.-china-trade-war-has-become-cold-war-pub-85352>
- Hurst, C (Lt. Cmdr. Ret'd). 2017. "Compelling Reasons for the Expansion of Chinese Military Forces". Military Review. Vol. 97, No. 6. Tersedia di <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/archives/ENGLISH/November-December-2017-English-book.pdf>
- Institute for Economics and Peace. 2017. "Global Peace Index (GPI) 2017: Measuring Peace in Complex World". Tersedia di <https://reliefweb.int/attachments/77490efd-7de2-339e-ac90-8a112705a826/GPI-2017-Report-1.pdf>
- International Maritime Organization. 2009-2023. "Piracy Reports". Tersedia di <https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/Piracy-Reports-Default.aspx>
- McKinsey&Company. 2017. "Report: The Closest Look Yet at Chinese Economic Engagement in Africa". Tersedia di <https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/the-closest-look-yet-at-chinese-economic-engagement-in-africa>
- Mwatela, R., & Changfeng, Z. 2016. "Africa in China's 'One Belt, One Road' Initiative: A Critical Analysis". IOSR Journal Of Humanities And Social Science. Vol. 21, No. 1. Tersedia di <https://content.csbs.utah.edu/~mli/Econ%205420-6420-Fall%202018/Zhao-Africa%20in%20Belt%20and%20Road%20Initiative.pdf>.
- Nuechterlein, Donald E. 1976. "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making". British Journal of International Studies, Cambridge University Press. Vol. 2, No. 3. Tersedia di: <http://www.jstor.org/stable/20096778>.
- Office of Secretary of Defense. 2020. "Annual Report To Congress: Military And Security Developments Involving The People's Republic Of China". U.S. Department of Defense. Tersedia di: <https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF>
- PLA Daily. 2018. The First Escort Mission, dalam http://www.81.cn/2018zt/2018-12/14/content_9378854.htm, diakses pada 5 mei 2023, diakses pada 7 Juli 2023.
- The Atlantic. 2021. The Chinese 'Debt Trap' Is a Myth, dalam <https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/02/china-debt-trap-diplomacy/617953/>, diakses pada 20 Oktober 2023.
- The London School of Economics and Political Science. 2022. What is FOCAC? Three Historic Stages in The China-Africa Relationship, dalam <https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2022/02/03/what-is-focac-three-stages-the-new-china-africa-relationship-trade-economics/>, diakses pada 15 Mei 2023.
- The State Council Information Office of the People's Republic of China. 2015. "China's Military Strategy (2015)". Tersedia di: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_2814751156_10833.htm
- TRT World. 2022. Egypt's Suez Canal Nets Record \$6.3 Billion Revenue Last, dalam <https://www.trtworld.com/business/egypt-s-suez-canal-nets-record-6-3-billion-revenue-last-year-53231>, diakses pada 12 Januari 2023.
- Ragas, K. 2021. "Djibouti at a Crossroads: China's African Engagement and an Adversarial Beijing-Washington Relationship". Future Directions International. Tersedia di: <https://www.futuredirections.org.au/publication/djibouti-at-a-crossroads-chinas-african-engagement-and-an-adversarial-beijing-washington-relationship/>.

- Siebens, J & Lucas, R. 2022. "Military Operations Other Than War in China's Foreign Policy." The Stimson Center. Tersedia di <https://www.stimson.org/2022/military-operations-other-than-war-and-chinas-foreign-policy/>
- South China Morning Post. 2020. Chinese Flee Northern Ethiopia Civil Conflict Hits Region, dalam <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3111056/chinese-flee-northern-ethiopia-civil-conflict-hits-region>, diakses pada 17 Juni 2023.
- . 2023. Evacuation from Sudan: How China's Years of African Conflict Experience Led to Successful Mission, dalam <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3218722/sudan-evacuation-based-chinas-years-african-conflict-experience>, diakses pada 4 Mei 2024.
- Surya, M., R. 2020. "Analisis Kepentingan Pemerintah Djibouti Dalam Menerima Kedatangan Pangkalan Militer Asing Tiongkok". Tersedia di: [http://digilib.uinsby.ac.id/47103/2/Mohammad%20Rahadian%20Surya_I72216 070.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/47103/2/Mohammad%20Rahadian%20Surya_I72216%20070.pdf)
- Venugopalan, H. 2017. "Somalia: A Failed State?". Observer Research Foundation. Tersedia di: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2017/02/ORF_Issue_Brief_170_Somalia.pdf
- Wang, T. 2018. "China And The Middle East: Old Friends In A New Era. International Institute for Asian Studies (IIAS)". Tersedia di <https://www.iias.asia/the-newsletter/article/china-middle-east-old-friends-new-era>
- Zubaraoil. 2021. Ethiopia-Djibouti Gas Pipeline, dalam <https://zubaraoil.com/2021/04/29/ethiopia-djibouti-gas-pipeline/>, diakses pada 8 September 2023.